

**IMPLEMENTASI PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS
PENGGELOPAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA
PATEMON KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG**

Oleh

I Kadek Adi Wira Utama, NIM. 2114101163

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata tentang kewajiban ganti rugi dana nasabah lembaga perkreditan desa patemon yang telah digelapkan. (2) untuk mengetahui upaya serta kendala yang dihadapi oleh lembaga perkreditan desa patemon dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dananya telah digelapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yang semuanya terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan meliputi analisis dokumen, metode pengamatan dan metodologi wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling berbentuk purposive sampling yang berarti penarikan sampel dengan tujuan tertentu. Hasil yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bawasannya (1) implementasi pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kewajiban ganti rugi dana nasabah Lembaga Perkreditan Desa Patemon yang telah digelapkan belum terimplementasi dengan optimal, hal ini dikarenakan tidak sanggupnya pelaku dalam melakukan ganti rugi yang diharapkan oleh pihak desa yang dilakukan dengan musyawarah dengan desa adat dan pemerintah desa. (2) pemerintah desa dan desa adat sudah melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, dengan melakukan musyawarah yang dilakukan pemerintah desa, desa adat serta masyarakat akan tetapi tidak menemukan solusi yang tepat, sehingga sampai saat ini hanya menunggu masa hukuman pelaku berakhir dan kemudian dibahas kembali untuk tanggung jawab pelaku dalam mengembalikan dana yang telah digelapkan tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Pertanggungjawaban, Penggelapan, LPD, Desa Patemon

***IMPLEMENTATION OF ARTICLE 1365 OF THE CIVIL CODE IN CIVIL
LIABILITY FOR EMBASEMENT OF FUNDS IN THE VILLAGE CREDIT
INSTITUTION OF PATEMON SERIRIT DISTRICT, BULELENG REGENCY***

By

I Kadek Adi Wira Utama, NIM. 2114101163

Law Study Program

ABSTRACT

This study aims to (1) find out how the implementation of Article 1365 of the Civil Code concerning the obligation to compensate for funds of Patemon Village Credit Institution customers that have been embezzled. (2) to find out the efforts and obstacles faced by Patemon Village Credit Institutions in providing compensation to customers whose funds have been embezzled. The research method used is empirical legal research and is descriptive in nature. The data used in this study are primary and secondary data, consisting of primary, secondary, tertiary legal materials, all of which consist of primary and secondary data. Data collection techniques used include document analysis, observation methods and interview methodology. The sampling technique used is non-probability sampling in the form of purposive sampling which means drawing samples with a specific purpose. The results obtained are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that (1) the implementation of Article 1365 of the Civil Code concerning the obligation to compensate for the funds of customers of the Patemon Village Credit Institution that have been embezzled has not been implemented optimally, this is because the perpetrators are unable to make the compensation expected by the village which is carried out through deliberation with the traditional village and village government. (2) the village government and traditional village have made efforts to overcome the problem, by holding deliberations carried out by the village government, traditional village and community but have not found the right solution, so that until now they are only waiting for the perpetrator's sentence to end and then discussing again the perpetrator's responsibility in returning the embezzled funds.

Keywords: Implementation, Accountability, Embezzlement, LPD, Patemon Village